PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI BIMBINGAN KELOMPOK[1]

Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. [2]
Email: sus_rahardjo@yahoo.co.id

Abstrak

Korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf akut, hampir semua elemen penyelenggara negara – eksekutif, legislatif dan yudikatif – mulai dari tingkat kabupaten/kota, propinsi sampai tingkat pusat terlibat korupsi. Kita semua sepakat bahwa korupsi merupakan perilaku yang harus segera diberangus sampai ke akar-akarnya.
Pendidikan anti korupsi harus segera dilakukan oleh institusi pendidikan melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik pemberian informasi, diskusi kelompok, dan permainan peranan agar setiap siswa setelah mengikuti layanan memahami, mencegah, dan mengatasi perilaku korupsi.

Kata kunci: korupsi, pendidikan anti korupsi, bimbingan kelompok

PENDAHULUAN

Skandal korupsi mantan Ketua MK, Akil Mochtar kian membuat jeblok potret korupsi di Indonesia. Publik dibuat terhenyak, karena perilaku korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara sudah sempurna. Mulai dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, aparatnya sudah terlibat korupsi. Lalu, apa yang harus dilakukan? (Nabila dan Anggi, Nopember 2013 – Januari 2014)

Berbagai upaya pemberantasan korupsi mulai dari pencegahan sampai dengan penindakan, tidak mengurangi jumlah tindakan korupsi. Tindakan dan perilaku korupsi trendnya justru meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu hal yang disinyalir tidak menimbulkan efek jera bagi para koruptor adalah ringannya hukuman bagi para pelaku korupsi. Bahkan ada koruptor yang dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari hukuman karena tidak adanya bukti-bukti yang cukup dan "kepiawaian" pengacara yang membela mereka.

Namun demikian perang melawan korupsi tidak boleh berhenti. Pendidikan nasional Indonesia yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

---

1 Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia" diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-49 Unnes oleh DPP IKA Unnes di Universitas Negeri Semarang: Rabu, 26 Maret 2014.

2 Lektor Kepala Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah dpk pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Departemen Pendidikan Nasional, 2003:11), harus terus diupayakan agar peserta didik tidak terkontaminasi oleh virus korupsi.

Pendidikan anti korupsi melalui bimbingan kelompok merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh konselor dalam mencegah sedini mungkin perilaku korupsi. Siswa-siswa sebagai peserta layanan bimbingan kelompok disajikan berbagai informasi, melakukan diskusi dan kegiatan lain agar mereka memperoleh *pemahaman* mengenai dampak buruk tindakan dan perilaku korupsi; *pencegahan* terhadap dorongan, keinginan, dan kesempatan melakukan korupsi; memunculkan ide-ide kreatif untuk melakukan *pengentasan* masalah korupsi; *pengembangan dan pemeliharaan* terhadap situasi dan kondisi positif di mana peserta layanan bersih dari tindakan dan perilaku positif.

PERILAKU KORUPSI MERUPAKAN PENYAKIT MENULAR

Korupsi merupakan kata benda (*nomina*) yang dimaknai sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Alwi, 2001:597). Dalam konteks sekarang, korupsi tidak hanya menyangkut uang negara, perusahaan, badan usaha Negara, badan usaha swasta, koperasi masyarakat, dan kelompok tertentu; tetapi dapat pula berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang memiliki "nilai ekonomis", bahkan gratifi kasi seks pun merupakan objek korupsi untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Perilaku korupsi dengan demikian dapat diartikan sebagai perilaku seseorang dan/atau sekelompok orang yang menyelewengkan atau menyalahgunakan wewenang yang ada pada seseorang dan/atau sekelompok orang. Perilaku manusia dalam kajian psikologi dan pendidikan merupakan hasil belajar.

Menurut behavioristik manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial budaya, sehingga perilaku manusia dapat dipelajari. Dalam konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar (Rusmana, 2009:65).

Mengacu pada Rusmana (2009:65) di atas, perilaku korupsi tidak mungkin berdiri sendiri, berasal dari dorongan dalam diri pelaku korupsi; melainkan mengikuti hukum dan kaidah *stimulus and response*. Pelaku korupsi "digoda" pihak lain untuk menerima sesuatu atas jasanya, fasilitas yang diberikannya, penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. Itu semua karena lingkungan sosial budaya yang melingkupinya, dan ia belajar dari lingkungannya bahwa korupsi di Indonesia sudah jamak dilakukan oleh mereka yang punya fasilitas, wewenang dan kedudukan. Sementara di sisi lain ia pun

belajar bahwa hukum yang diberlakukan tidak tegas dan keras, misalnya pelaku korupsi disita semua kekayaannya, dihukum mati. Hukuman seumur hidup dan denda sekian milyar tidak memberikan efek jera karena pelaku korupsi selalu mendapatkan remisi, dan hartanya yang disimpan di berbagai tempat masih aman untuk dinikmati oleh istri, anak cucu dan kroni-kroninya

Korando - Koran Anak Indonesia (2010) menyatakan bahwa, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Lebih lanjut dinyatakan, dampak buruk korupsi bagi masyarakat dan bangsa meliputi (1) kesejahteraan umum negara terancam, (2) demokrasi tidak fair, (3) menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi, (4) korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, (5) menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, (6) penurunan kualitas moral dan akhlak.

Mengingat dampak buruknya perilaku korupsi sebagai hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar, sudah seharusnya diperlukan cara-cara kreatif untuk mengubah perilaku korupsi, memberantasnya, terutama mencegahnya agar tidak terjadi. Layanan bimbingan kelompok diyakini dapat mencegah dan mengubah perilaku korupsi, dimulai dari pendidikan di sekolah dan kemudian melebar ke masyarakat luas.

BIMBINGAN KELOMPOK

Layanan bimbingan dan konseling sekarang ini bukan hanya dilaksanakan di latar sekolah tetapi sudah menjangkau luar sekolah dan masyarakat luas. Sepuluh jenis layanan dapat dilakukan oleh konselor, meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan/penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konseling perorangan, layanan mediasi, layanan konsultasi, dan layanan advokasi (Prayitno, 2012:2-3). Masing-masing layanan mempunyai prosedur yang berbeda, meskipun tujuan akhirnya adalah mewujudkan peserta layanan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.

Penulis memilih layanan bimbingan kelompok dalam konteks makalah pendidikan anti korupsi ini, dengan pertimbangan sebagaimana alasan-alasan berikut ini.

Rahardjo (2004:5) menyatakan bahwa bimbingan kelompok didasarkan pada:

1. Adanya kebutuhan dari klien akan suasana kelompok karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk individual dan makhluk sosial.

   Statemen tersebut di atas menggambarkan bahwa secara kodrati setiap manusia itu membutuhkan orang lain agar ia dapat melangsungkan hidupnya secara wajar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat hidup secara normal tanpa orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan manusia lain. Sebab pada hakekatnya ada hal-hal tertentu yang dapat dipenuhi oleh individu itu sendiri, tetapi ada hal-hal tertentu pula yang pemenuhannya harus melibatkan orang lain (kelompok). Misalnya untuk mengatasi korupsi tidak bisa dilakukan secara perorangan. Seorang Abraham Samad tidak dapat memberantas korupsi tanpa didukung banyak orang yang ada di KPK dan lembaga terkait.
2. Adanya suatu masalah atau kesulitan dari klien yang lebih tepat atau harus diselesaikan dalam kegiatan dan suasana kelompok.

   Masalah-masalah klien yang membutuhkan penyelesaian dengan kegiatan dan suasana kelompok adalah masalah yang tidak bersifat pribadi dan emosional, misalnya masalah sosial, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah penggunaan waktu luang, masalah penempatan dan penyaluran bakat dan minat, masalah pengajaran atau belajar. Pendidikan anti korupsi harus diselesaikan dalam kegiatan dan suasana kelompok.

Hal ini dimungkinkan karena bimbingan kelompok memiliki beberapa keunggulan mendasar (Sugiharto, 2012:1), antara lain :

(1) membantu seseorang atau sejumlah orang yang tidak siap dan terbuka secara perorangan menemui konselor,
(2) memfasilitasi individu atau sekelompok individu yang lebih berani berbicara dan terbuka saat bersama-sama temannya,
(3) dapat melayani sejumlah orang dalam waktu yang bersamaan,
(4) menimbulkan keakraban, membangun suasana saling percaya, saling membantu, dan empati diantara sesama anggota kelompok dan konselor,
(5) menemukan alternatif pemecahan masalah yang lebih banyak dan bervariasi, karena mengemukanya berbagai pemikiran dari anggota,
(6) praktis, dalam arti dapat dilakukan di mana saja, di dalam ruangan atau di luar ruangan, di sekolah atau di luar sekolah, di rumah salah seorang peserta atau di rumah konselor, di suatu kantor, atau di ruang praktik pribadi konselor.

Dengan demikian layanan bimbingan kelompok mempunyai nilai lebih dari pada konseling perorangan, karena melibatkan banyak orang sekaligus dalam satu kegiatan, di mana komunikasi dan interaksi antar anggota kelompok dapat memberikan pencerahan, pemahaman, dan memunculkan ide-ide kreatif untuk mengatasi prilaku korupsi.

Gibson dan Mitchell (2011:52) menyatakan bahwa, bimbingan kelompok merupakan aktivitas yang dirancang untuk menyediakan kepada individu-individu sejumlah informasi atau pengalaman yang memajukan karier atau pengertian tentang pendidikan, pertumbuhan pribadi dan penyesuaian sosial mereka. Lebih lanjut, dikatakan bahwa bimbingan kelompok juga diorganisasikan untuk mencegah berkembangnya problem. Isinya bisa mencakup informasi pendidikan, pekerjaan, pribadi atau sosial, dengan tujuan menyediakan kepada siswa informasi akurat yang akan membantu mereka membuat perencanaan hidup dan pengambilan keputusan yang tepat.

Pendapat Gibson dan Mitchell di atas menunjukkan kepada kita bahwa informasi mengenai pendidikan anti korupsi diharapkan dapat memberikan gambaran kepada peserta layanan sehingga mereka tidak tergoda untuk melakukannya. Siswa sebagai peserta layanan dan konselor sebagai pemberi layanan merupakan komponen penting dalam keberhasilan pendidikan anti korupsi.

TEKNIK BIMBINGAN KELOMPOK

Teknik bimbingan kelompok bukan merupakan tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan bimbingan kelompok. Pemilihan dan penggunaan teknik bimbingan kelompok didasarkan atas kebutuhan kelompok baik itu menyangkut konselor maupun konseli. Kreativitas konselor dalam menggunakan dan mengembangkan teknik bimbingan kelompok membantu dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bimbingan kelompok.

Romlah (2006: 87-125) menyatakan bahwa teknik bimbingan kelompok terdiri dari pemberian informasi atau teknik ekspositori, diskusi kelompok, pemecahan masalah, permainan peranan, permainan simulasi, karyawisata, dan *homeroom*. Penulis memilih teknik pemberian informasi, diskusi kelompok dan permainan peranan dalam memberikan layanan bimbingan kelompok untuk membahas pendidikan anti korupsi.

1. Pemberian Informasi

Teknik pemberian informasi dapat juga disebut sebagai *ceramah bimbingan* yaitu pemberian penjelasan oleh seorang pembicara (konselor) kepada sekelompok siswa. Pemberian informasi atau ceramah bimbingan tidak semata-mata dilakukan secara lisan, tetapi dapat pula dilakukan dengan tertulis, bahkan dapat dibantu dengan papan bimbingan, *poster, newsletter, bulletin* dan majalah sekolah, *slide,* dan *film.*

Sebagai informasi awal untuk memberikan pemahaman dan pencegahan konselor dapat memberikan layanan dengan cara menyajikan kliping berita korupsi dan dampaknya yang berkaitan di papan bimbingan, poster ajakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, stiker anti korupsi.

Kegiatan informasi tersebut dilanjutkan melalui pertemuan dengan siswa di kelas untuk menjelaskan korupsi dan dampaknya melalui potongan-potongan film berita korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan pejabat publik. Tunjukkan perilaku mereka yang menghambur-hamburkan uang negara (yang berarti uang rakyat juga), hidup mewah dan berfoya-foya, menimbun mobil mewah dan rumah mewah, memiliki beberapa istri simpanan yang ikut menikmati uang rakyat; sementara di sisi lain ditayangkan gambar rakyat yang miskin di mana-mana, jalan dan jembatan tidak diperbaiki, anak-anak sekolah sulit memperoleh akses.

Dari pemberian informasi (ceramah bimbingan) dilanjutkan dengan tanya jawab, dan simpulan korupsi dan dampaknya bagi masyarakat dan negara. Konselor dapat memberikan tugas lanjutan kepada siswa (1) untuk mengkliping berita korupsi dan mereka diminta untuk memberikan komentar dan kritik atas peristiwa tersebut, (2) membuat karya pendidikan anti korupsi berupa karikatur, poster, essay, pantun, untuk dimuat di majalah dinding, blog atau web sekolah.

2. Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok merupakan teknik bimbingan kelompok yang paling sering digunakan, baik dipadukan dengan teknik yang lain maupun berdiri sendiri; dalam arti sejak mulai kegiatan sampai dengan akhir bimbingan kelompok dilakukan dengan diskusi. Romlah (2006:89) mengutip pendapat Bloom (dalam Bennet, 1963) mengemukakan: Diskusi kelompok merupakan usaha bersama untuk memecahkan suatu masalah, yang didasarkan pada sejumlah data, bahan-bahan, dan pengalaman-pengalaman, di mana masalah ditinjau selengkap dan sedalam mungkin. Secara idea, pemimpin kelompok membantu kelompok untuk memusatkan perhatian pada masalah yang dihadapi, membantu meninjau masalah secara luas dan mendalam, membantu memberikan sumber-sumber yang dapat dipakai untuk pemecahan masalah, dan membantu kelompok mengetahui bilaman masalah sudah terpecahkan serta implikasi selanjutnya dari pemecahan tersebut.

Layanan bimbingan kelompok dengan tema "Pendidikan Anti Korupsi" yang didiskusikan oleh sekelompok siswa dengan dipimpin konselor, merujuk pendapat Rahardjo (2004:50-56), kegiatan diskusi kelompok dilakukan melalui tahap awal, tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap akhir.

Tahap awal berlangsung sampai berkumpulnya seluruh anggota kelompok dan dimulainya tahap pembentukan. Pada tahap awal ini menyangkut kegairahan maupun keengganan atau bahkan sikap penolakan para (calon) anggota kelompok untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok yang

dimaksud. Pada tahap awal konselor dapat mengawali kegiatan antara lain dengan informasi melalui papan bimbingan, poster, pengumuman di kelas.

Tahap pembentukan merupakan tahap pengenalan, tahap untuk melibatkan diri atau memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini pada umumnya para anggota itu saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan atau pun harapan yang ingin dicapai dengan kegiatan kelompok ini, baik oleh masing-masing anggota maupun sebagian anggota. Dalam hal ini pemimpin kelompok hendaknya:

(1) menyampaikan salam dan ucapan terima kasih serta memimpin doa
(2) menjelaskan arti dan tujuan diskusi kelompok
(3) menjelaskan cara pelaksanaan diskusi kelompok
(4) menjelaskan azas-azas yang digunakan dalam kegiatan ini
(5) melaksanakan perkenalan, permainan dan kesepakatan waktu

Dalam tahap peralihan di warani suasana ketidakseimbangan. Seringkali terjadi konflik atau bahkan konfrontasi antar anggota kelompok. Pada tahap ini pemimpin kelompok:

(1) menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan selanjutnya
(2) menginformasikan kepada anggota kelompok bahwa pada saat ini tema yang hendak dibahas adalah "masalah korupsi"

Tahap kegiatan merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok. Kegiatan kelompok pada tahap ini tergantung pada hasil dari tahap sebelumnya. Jika tahap-tahap sebelumnya berhasil dengan baik, maka tahap ini akan berlangsung dengan lancar, dan pemimpin kelompok mungkin sudah dapat lebih santai dan membiarkan para anggota kelompok tanpa banyak canpur tangan pemimpin kelompok. Bebarapa hal yang harus dilakukan oleh pemimpin kelompok adalah:

(1) memberikan kesempatan kepada anggota kelompok kalau ada usulan topik/tema/masalah lain yang hendak dibahas. Namun demikian, konselor menekankan "masalah korupsi" untuk diprioritaskan
(2) menyepakati "masalah korupsi" untuk dibahas sekarang
(3) mendorong anggota kelompok untuk tanggapan tentang "masalah korupsi"
(4) mengarahkan anggota kelompok untuk membahas "masalah korupsi" secara sistematis
(5) membahas "masalah korupsi" bersama anggota kelompok
(6) melaksanakan selingan/permainan dan menciptakan kehangatan dalam mengelola bimbingan kelompok
(7) menyimpulkan dan mengamati perkembangan setiap anggota kelompok dalam pembahasan "masalah korupsi". Konselor memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk mengemukakan ide dan pendapatnya,

sementara itu perlu membatasi anggota tertentu yang mendominasi pembicaraan

Pada tahap kegiatan ini konselor perlu menekankan agar anggota kelompok membahas "masalah korupsi" dalam kontek *di sini dan sekarang* berdasarkan informasi, fakta dan data yang mereka peroleh dan ketahui.

Berkenaan dengan pengakhiran kegiatan kelompok, pokok perhatian utama bukanlah pada beberapa kali kelompok itu harus bertemu tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu. Untuk itu pemimpin kelompok hendaknya:

(1) menginformasikan kepada anggota kelompok bahwa kegiatan akan diakhiri
(2) meminta anggota kelompok untuk memberikan kesean setelah mengikuti kegiatan
(3) meminta anggota kelompok untuk menyampaikan komitmennya terhadap masalah yang dibahas
(4) membahas kegiatan bimbingan kelompok lanjutan
(5) memimpin doa dan mengucapkan terima kasih, dilanjutkan dengan perpisahan

3. Permainan Peranan

Teknik permainan peranan (*role playing*) dalam bimbingan kelompok terdiri atas sosiodrama dan psikodrama. Mengutip pendapat Corsini (1966) dan Shaw, dkk (1980), Romlah (2006:98) menjelaskan bahwa istilah permainan peranan mempunyai empat macam arti. Penulis lebih menitik beratkan arti yang ke (4) karena sesuai dengan kegiataan bimbingan kelompok, yaitu diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, di mana individu memerankan situasi yang imaginatif dengan tujuan uintuk tercapainya pemahaman diri sendiri, meningkatkan keterampilan-keterampilan, menganalisis perilaku, atau menunjukkan pada orang lain bagaimana perilaku seseorang atau bagaimana seseorang harus bertingkah laku.

Penulis dalam melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik permainan peranan memilih sosiodrama untuk "Pendidikan Anti Korupsi". Sosiodrama adalah permainan peranan yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Konflik-konflik sosial yang disosiodramakan adalah konflik-konflik yang tidak mendalam yang tidak menyangkut gangguan kepribadian (Romlah, 2006:104). Misalnya pertentangan antar kelompok, perbedaan nilai antara orang tua dengan anak, perbedaan pandangan perilaku korupsi antara pelaku dengan orang yang tidak melakukan.

Pelaksanaan sosiodrama dalam membahas tema "Pendidikan Anti Korupsi" mengikuti langkah-langkah sebagaimana mengacu pada tulisan Romlah (2006:104-105) adalah:

(1) Persiapan.

Konselor mengemukakan masalah korupsi yang akan disosiodramakan, dan tujuan permainan yaitu setiap peserta mendapatkan pemahaman tentang korupsi, bahaya dan dampaknya terhadap masyarakat dan bangsa. Kemudian dilakukan Tanya jawab untuk memperjelas masalah dan peranan-peranan yang akan dimainkan, misalnya korupsi Pemilukada yang melibatkan mantan Ketua MK.

(2) Membuat skenario sosiodrama

Konselor bersama siswa merancang rangkuman atau garis besar cerita sosiodrama.

(3) Menentukan kelompok yang akan memainkan sesuai dengan kebutuhan skenarionya, dan memilih individu yang akan memegang peran tertentu.

Siswa-siswa di kelas tersebut ditawarkan siapa yang mau menjadi peserta sosiodrama. Misalnya ada yang berperan sebagai Akil Mochtar, Wawan, artis-artis cantik penerima mobil, warga masyarakat Banten yang miskin, dan peran lain sesuai kebutuhan.

Pemilihan pemegang peran dapat dilakukan secara sukarela, usulan dari siswa yang lain, atau berdasarkan kedua-duanya.

(4) Menentukan kelompok penonton dan menjelaskan tugasnya

Kelompok penonton adalah siswa yang tidak bertugas sebagai pemain. Tugas kelompok penonton adalah melakukan observasi pelaksanaan sosiodrama. Hasil observasi kelompok penonton merupakan bahan diskusi setelah sosiodrama selesai.

(5) Pelaksanaan sosiodrama

Setelah semua peran terisi, para pemain diminta untuk berembug beberapa menit menyiapkan diri bagaimana sosiodrama itu akan dimainkan. Setelah siap, dimulailah sosiodrama. Masing-masing pemain memerankan perannya berdasarkan imajinasinya tentang peran yang dimainkannya. Pemain diharapkan dapat memeragakan konflik-konflik yang timbul dalam peristiwa korupsi, mengekspresikan perasaan-perasaan. Dalam sosiodrama ini diharapkan terjadi identifikasi yang sebenar-benarnya antara pemain maupun penonton dengan peran-peran yang dimainkannya, agar pemahaman terhadap korupsi berserta dampak negatifnya menjadi perilaku yang memuakkan, menjijikkan, dan menyengsarakan banyak pihak.

(6) Evaluasi dan diskusi

Setelah sosiodrama selesai diadakan diskusi mengenai pelaksanaan permainan berdasarkan hasil observasi dan tanggapan penonton. Diskusi diarahkan untuk membicaraakan tanggapan mengenai bagaimana para pemain membawakan perannya sebagai Akil Mochtar, Wawan, Jennifer Dunn, Pengacara Wawan, warga masyarakat Banten; cara mereka

memecahkan masalah, dan kesan-kesan pemain dalam memainkan perannya. Evaluasi paling lengkap adalah hasil *shooting* sosiodrama ini ditayangkan ulang.

(7) Ulangan permainan

Dari hasil diskusi dapat ditentukan apakah perlu dilakukan ulangan sosiodrama atau tidak

Ketiga teknik tersebut dilaksanakan dalam waktu yang berbeda terhadap kelompok yang anggotanya tetap, sehingga pemahaman peserta layanan mengenai "Pendidikan Anti Korupsi" lengkap dan utuh. Mereka tidak hanya memperoleh informasi dari ceramah, tetapi juga terlibat dalam pemecahan masalah melalui diskusi dan permainan peranan. Tujuan dari layanan bimbingan kelompok dengan tiga teknik secara terpadu ini mendorong peserta untuk ikut mencegah dan memberantas korupsi.

Merujuk pada konsep behavioral (Rusmana, 2006:65) bahwa perilaku manusia merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar; penulis yakin bahwa perilaku korupsi dapat dicegah dan diberantas kalau kita mau belajar dengan benar bahwa korupsi merupakan perilaku yang merusak sendi-sendi kehidupan manusia dan pelanggaran HAM yang berat (Hermawan, 2010) karena dampaknya sangat luas.

PENUTUP

Berdasarkan paparan-paran di muka dapat disimpulkan bahwa:

1. Korupsi merupakan perilaku merusak sendi-sendi kehidupaan manusia dan pelanggaran HAM yang berat
2. Dampak korupsi sangat luas yaitu (1) kesejahteraan umum negara terancam, (2) demokrasi tidak fair, (3) menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi, (4) korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, (5) menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, (6) penurunan kualitas moral dan akhlak.
3. Layanan bimbingan kelompok dengan teknik pemberian informasi, diskusi kelompok, dan permainan peranan (sosiodrama) dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang dampak buruk korupsi, sehingga siswa ikut terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan terdekatnya sedini mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Hasan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Gibson, Robert L. & Mitchell, Marianne H. 2011. *Bimbingan dan Konseling*. Edisi ketujuh. Alih Bahasa oleh Yudi Santoso. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hermawan, Adi. 2010. *Korupsi adalah Pelanggaran HAM*. Tersedia on line di http:// ardi-rocn.blogspot.com/2010/04/artikel-tentang-korupsi.html. diunduh 19 Maret 2014.

Korando - Koran Anak Indonesia. 2010. *Dampak Buruk Korupsi Bagi Masyarakat dan Bangsa*. Tersedia on line di http://korananakindonesia.com/ 2010/12/09/dampak-korupsi-bagi-masyarakat/. diunduh 19 Maret 2014.

Nabila dan Anggi. 2013-2014. Memahami Hulu Korupsi. *Info Muria / Edisi XVI / Nopember 2013 – Januari 2014*. ISSN: 2088-2920.

Prayitno. 2012. *Seri Panduan Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling: Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*. Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

Rahardjo, Susilo. 2004. *Bimbingan Kelompok*. Kudus: Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus.

Romlah, Tatik. 2006. *Teori dan Praktek Bimbingan Kelompok*. Cetakan II. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.

Rusmana, Nandang. 2009. *Bimbingan dan Konseling Kelompok di Sekolah (Metode, Teknik dan Aplikasi)*. Bandung: Rizki

Sugiharto, DYP. 2010. *Konsep Dasar Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok*. Tersedia on line di http://konselorindonesia.blogspot.com/ 2010/11/bimbingan-kelompok- dan- konseling.html. diunduh 18 Januari 2012.